

FPII

LSM Garuda Indonesia dan Laskar Sasak Dampingi Masyarakat Peduli Transportasi Lokal Gelar Unjuk Rasa di BIZAM

Syafruddin Adi - NTB.FPII.OR.ID

Jan 16, 2025 - 17:32



Lombok Tengah NTB - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GARUDA INDONESIA dan LASKAR SASAK mendampingi Kelompok Masyarakat Peduli Transportasi Lokal melakukan unjuk rasa di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) Lombok tengah, Kamis (16/01/2025).

Dimulai dengan orasi yang dilakukan di depan Rumah Makan (RM) Pusaka Jalan Bil KM 2 Penujak kecamatan praya barat lombok tengah. Selanjutnya masa aksi tersebut diterima langsung oleh General manager (GM) Angkasa Pura (AP) I Bandara Lombok yaitu Bapak Bharata Singgih di dampingi oleh Kepala Bagian Operasional (kabag Ops) Polres Lombok Tengah (Loteng) AKP Harry Indrayanto.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Saudara M. Zaini selaku Direktur LSM GARUDA INDONESIA menyampaikan bahwa teman teman perwakilan Aksi Beberapa hari yang lalu di panggil oleh ketua DPRD Loteng terkait dengan tuntutan yang dilakukan hari ini. Yaitu terkait dengan kuota kendaraan yang akan beroperasi di Bandara bagi masyarakat Lokal.



Namun pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak kendaraan yang beroperasi diluar kesepakatan yang telah dibuat. Untuk itu kami bersama sopir lokal datang hari ini untuk menuntut kepada pihak Angkasa Pura I (satu) Bandara Lombok untuk menertipkan kendaraan yang beroperasi dan prioritaskan bagi masyarakat lokal.

“ Kami datang hari ini untuk meminta Angkasa Pura 1 (satu) Bandara Lombok untuk menertipkan kendaraan yang beroperasi di bandara ini dan kasih kami masyarakat lokal prioritas” Ungkap M. Zaini.

Aktivis yang selama ini aktif membela kepentingan masyarakat ini juga menegaskan bahwa, selama ini masyarakat terutama sopir lokal meminta kepada pihak Mitra ANGKASA PURA I (Satu) Bandara Lombok untuk mendata kendaraan yang beroperasi di Angkasa Pura sehingga memudahkan untuk pengecekan dan sampai saat ini pihak Angkasa Pura I (satu) Bandara Lombok tidak memberikan jawaban sampai saat ini. Bahkan permintaan ini kami layangkan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui surat.

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional bahwa kebutuhan transportasi di bandara harus dikendalikan jangan sampai jumlah tidak seimbang antara penumpang dan kendaraan yang beroperasi untuk menjaga kenyamanan.

GM Angkasa Pura I (satu) Bandara Lombok pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa setiap jasa penumpang yang sudah menjadi mitra resmi diberikan lokasi untuk disewa dalam bentuk konter dan ini adalah aturan dari pusat. Terkait dengan Taxi Blue Bird, semua bandara di Indonesia dituntut memberikan pelayanan pada pengguna jasa yang sebaik baiknya terutama pelayanan transportasi. Dan banyak keluhan dari pengguna jasa yang mengeluh terkait pelayanan bandara transportasi yang non Mitra sehingga kami dari pihak bandara susah untuk melacak dan mengecek kendaraan tersebut.

“Kami menerima banyak keluhan dari penumpang terkait dengan kinerja jasa penumpang, namun kami susah untuk mengeceknya” Ungkap Bapak Bharata Singgih.



Masa aksi juga membacakan tuntutan resminya kepada pihak AP I Bandara Lombok yaitu :

1. Bubarkan jasa angkutan berbasis sistem counter online di dalam Bandara International Lombok.
2. Menolak masuknya Taxi Bluebird.
3. Meminta Angkasa Pura untuk membubarkan counter Grab dan Gojek di area Bandara International Lombok, karena sejatinya Grab dan Gojek adalah jasa layanan transportasi berbasis online.
4. Kembalikan "marwah" sopir lokal dan mengembalikan hak-hak driver menggunakan conter biasa.
5. Mengharapkan kebijakan dari pihak Angkasa Pura untuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap jasa tarif parkir parkir di Bandara International

Lombok khususnya bagi masyarakat sekitar yang menyediakan jasa angkutan, mengingat keberadaan kami di Bandara International Lombok adalah dalam upaya mencari rezeki, demi menunjang perekonomian keluarga.

6. Driver lokal yang menjalankan usaha jasa transportasi diberikan atensi khusus, mengingat hal ini menyangkut perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Jangan sampai ada asumsi bahwa kemasyuran Bandara yang megah dan mewah justru tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

7. Tarif parkir di bandara yg begitu tinggi dan mahal dan sewaktu-waktu sering dinaikan apalagi menjelang motor GP karena itu sdh melanggar aturan dan undang-undang konsumen dan di duga pungli inilah yg membuat para konsumen bandara mengeluh

8. Para draiver lokal maupun luar lokal diminta untuk membyar satu setagah juta sampai dengan 8 delapan juta agar bisa masuk ke aplikasi conter. Hentikan yg menurut di duga pungli yg dilakukan oleh oknum2 yg memanfaatkan conter di dalam bandara.

Dan sebelum mengakhiri diskusi GM Angkasa Pura I meminta masa aksi untuk mendata perwakilan dari 3 desa untuk selanjutnya akan melakukan diskusi lagi terkait dengan tuntutan masa aksi dan diharapkan dengan akan adanya pembahasan lagi semua tuntutan dan keinginan masa aksi di sampaikan melalui perwakilan. (Adb)